

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2023**

RENJA TA.2023						
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
		115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
	PROVINSI & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA			
		5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		202 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		301 Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	5	Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		302 Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	5	Laporan
		5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
	RPJMN	5245.BDB.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah
		5245.BKC	Pemantauan Lembaga		30	Laporan
		5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		30	Laporan
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		202 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		203 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		204 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		205 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		301 Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	5	Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		302 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	5	Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		303 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	5	Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		304 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	5	Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		305 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	5	Laporan
		6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU			
		6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		11	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran		6	Lembaga
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen

Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202 Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203 Fasilitasi dan pembinaan aparat pengawas pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparat pengawas pemilu	4	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		204 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		205 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		206 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		207 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		208 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)		4	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302 Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	10	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi dan pembinaan aparat pengawas pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparat pengawas pemilu	20	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		304 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		305 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	20	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		306 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	20	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		307 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	20	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		308 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)		20	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401 Fasilitasi dan pembinaan aparat pengawas pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparat pengawas pemilu	34	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		402 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	34	Laporan
		6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		5	Laporan
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Rekrutmen panwaslu kecamatan (Kab./Kota)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	0	Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401 Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	291	Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		402 Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu		Daerah
		6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
		6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu		1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)		16	Unit
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)		30	Unit
		6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU			
		6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		3	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu		3	Laporan
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	0	Laporan

Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi sentra gakkumdu	3	Laporan
		6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC			
		6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		655	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc Komponen Input :		325	Lembaga
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401 Honorarium (Kecamatan)		34	Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kelurahan/Desa		501 Honorarium (Kelurahan/Desa)		291	Orang
		6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc Komponen Input :		330	Lembaga
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)		5	Lembaga
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)		5	Lembaga
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		402 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)		34	Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		403 Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)		34	Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		404 Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)		34	Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		405 Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)		291	Orang
Tahapan Pemilu (PN)	Kelurahan/Desa		502 Penanda Identitas (Kelurahan/Desa)			Orang
Tahapan Pemilu (PN)	TPS		602 Penanda Identitas (TPS)			Orang
		6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
		6839.QCE	Penanganan Perkara		6	Perkara, Berkas Perkara
		6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Komponen Input :		6	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara
		6839.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		343	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Komponen Input :		343	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	34	Laporan

Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
Tahapan Pemilu (PN)	Kelurahan/Desa		501 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	291	Laporan
		6840	PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU			
		6840.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6840.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu		1	Perkara
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	0	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	0	Perkara
		6840.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6840.QIC.001	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu		6	Laporan
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	0	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203 Fasilitas sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitas sentra gakkumdu	0	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	3	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303 Fasilitas sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitas sentra gakkumdu	2	Laporan
		6841	PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN			
		6841.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6841.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan		1	Perkara
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
		6841.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		8	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6841.QIC.001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan		8	Laporan
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	2	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	4	Laporan

Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
		6842	PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA			
		6842.QCE	Penanganan Perkara		6	Perkara, Berkas Perkara
		6842.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan		6	Perkara
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	5	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	5	Perkara
		6842.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		52	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6842.QIC.001	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		52	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	34	Laporan
		6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU			
		6843.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye		1	Perkara, Berkas Perkara
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		204 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	5	Perkara

Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	5	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		304 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	5	Perkara
		6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202 Pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302 Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401 Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	34	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		402 Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	34	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kelurahan/Desa		501 Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	291	Laporan
		6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
		6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		204 Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Provinsi)	Jumlah orang yang mengikuti ToT pelatihan saksi parpol		orang
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		304 Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Kab./Kota)	Jumlah orang yang mengikuti ToT pelatihan saksi parpol		orang
		6848	PENGAWASAN LOGISTIK			
		6848.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik		1	Perkara, Berkas Perkara
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	1	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202 Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	5	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302 Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	5	Laporan
		6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6848.QIC.001	Pengawasan Logistik		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202 Pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan

Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302 Pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303 Fasilitas sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitas sentra gakkumdu	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401 Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	34	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		402 Pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	34	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kelurahan/Desa		501 Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	291	Laporan
		115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
		4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL			
		4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		6	Dokumen, Layanan, Laporan
		4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		6	Dokumen, Layanan, Laporan
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	5	Dokumen
		4356	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI			
		4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		12	Layanan, Laporan, Dokumen
		4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		6	Laporan
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	5	Laporan
		4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		6	Laporan
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	5	Laporan
		6849	PENGLOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM			
		6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1	Layanan, Laporan, Dokumen
		6849.EBA.956	Layanan BMN		6	Layanan, Laporan, Dokumen
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	5	Laporan
		6849.EBA.994	Layanan Perkantoran		1	Layanan, Laporan, Dokumen
			Komponen Input :			
			001 Gaji dan tunjangan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	1	
Operasional Reguler	Provinsi		A) Gaji dan tunjangan Bawaslu Provinsi			
Operasional Reguler	Kab/kota		B) Gaji dan tunjangan Bawaslu Kabupaten/Kota			
			002 Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	1	
Operasional Reguler	Provinsi		A) Operasional dan pemeliharaan kantor Bawaslu Provinsi			
Operasional Reguler	Kab/kota		B) Operasional dan pemeliharaan kantor Bawaslu Kabupaten/Kota			
		6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		21	Unit, M2, Paket
		6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal		21	Unit, M2, Paket
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit
Non Operasional Reguler	Provinsi		202 Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	1	Unit

Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
Non Operasional Reguler	Provinsi		203 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301 Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	20	Unit
Non Operasional Reguler	Kab/kota		302 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit
Non Operasional Reguler	Kab/kota		303 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit
		6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		0	Unit, M2, Paket
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
Non Operasional Reguler	Provinsi		202 Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
Non Operasional Reguler	Kab/kota		302 Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
		6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		24	Dokumen, Layanan, Laporan
		6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		6	Dokumen, Layanan, Laporan
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	5	Dokumen
		6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		6	Dokumen
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	5	Dokumen
		6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		6	Dokumen
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	5	Dokumen
		6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		6	Dokumen, Layanan, Laporan
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301 Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	5	Dokumen
		6850	PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM			
		6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		31	Layanan, Laporan, Dokumen
		6850.EBA.957	Layanan Hukum		13	Laporan
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		202 Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait pemilihan	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		203 Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	5	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		302 Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	5	Laporan
		6850.EBA.962	Layanan Umum		6	Dokumen
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi		1	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota		5	Laporan
		6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		12	Laporan
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan

Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
Non Operasional Reguler	Provinsi		202 Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301 Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	5	Laporan
		6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		184	Orang, Layanan
		6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		184	Orang, Layanan
			Komponen Input :			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	54	Orang
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301 Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	130	Orang
TOTAL						

